

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan penelitian	14
2. Kegunaan penelitian	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Administrasi.....	16
2. Konsep Organisasi	20
3. Konsep Manajemen	22
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	24
5. Konsep Pengawasan	26
6. Efektivitas Pengawasan	31
7. Efisiensi Pengawasan.....	32

B. Kerangka Pikir.....	33
C. Hipotesis	34
D. Konsep Operasional.....	35
E. Operasionalisasi Variabel.....	38
F. Teknik Pengukuran.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Teknik Penarikan Sampel.....	47
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
H. Jadwal Waktu Kegiatan.....	49
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	51
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	51
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	51
2. Keadaan Demografi Kota Pekanbaru	52
3. Keadaan Fisiografi	52
4. Keadaan Sosial dan Budaya Kota Pekanbaru	53
5. Perekonomian Kota Pekanbaru	55
6. Pemerintahan Kota Pekanbaru	55
B. Gambaran Ringkas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau	58
C. Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau	65
D. Tugas dan Fungsi Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau	66
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Identitas Responden	72
1. Jenis Kelamin	72
2. Tingkat Umur	74
3. Pendidikan Responden	76

B. Hasil Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	79
1. Pengawasan Langsung	80
2. Pengawasan Tidak Langsung	93
C. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	116
BAB VI : PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR KEPUSTAKAAN	123
LAMPIRAN	126

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1 :	Daftar Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi, Radio, dan TV Berlangganan di Provinsi Riau Tahun 2018	8
I.2 :	Daftar Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel) Di Kota Pekanbaru	10
II.1 :	Operasionalisasi Variabel Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru).....	38
III.1 :	Populasi dan Sampel Pada Pimpinan dan Komisioner KPID Riau Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru).....	44
III.2 :	Populasi dan Sampel Pada Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel) Legal dan Ilegal Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	44
III.3 :	Populasi dan Sampel Pada Masyarakat Pelanggan TV Kabel Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	46
III.4 :	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	50
IV.1 :	Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan	54
IV.2 :	Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan di Kota Pekanbaru	57
V.1 :	Distribusi Jumlah Responden Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Menurut Jenis Kelamin Dalam Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	72

V.2 : Distribusi Jumlah Responden Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel Menurut Jenis Kelamin Dalam Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	73
V.3 : Distribusi Jumlah Responden Masyarakat Pelanggan TV Kabel Menurut Jenis Kelamin Dalam Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	73
V.4 : Distribusi Jumlah Responden Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Menurut Tingkat Umur Dalam Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	74
V.5 : Distribusi Jumlah Responden Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel Menurut Tingkat Umur Dalam Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	75
V.6 : Distribusi Jumlah Responden Masyarakat Pelanggan TV Kabel Menurut Tingkat Umur Dalam Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	76
V.7 : Distribusi Jumlah Responden Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Menurut Tingkat Pendidikan Dalam Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	77
V.8 : Distribusi Jumlah Responden Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel Menurut Tingkat Pendidikan Dalam Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	78
V.9 : Distribusi Jumlah Responden Masyarakat Pelanggan TV Kabel Menurut Tingkat Pendidikan Dalam Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	78

V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Komisioner Mengenai Indikator Pengawasan Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru) ‘	82
V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel Mengenai Indikator Pengawasan Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	84
V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pelanggan TV Kabel Mengenai Indikator Pengawasan Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	86
V.13 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Komisioner, Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel, dan Masyarakat Pelanggan TV Kabel Mengenai Indikator Pengawasan Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	90
V.14 : Data Sekunder Indikator Pengawasan Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	91
V.15 : Distribusi Tanggapan Responden Komisioner Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	96
V.16 : Distribusi Tanggapan Responden Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	98
V.17 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pelanggan TV Kabel Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	100

V.18 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Komisioner, Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel, dan Masyarakat Pelanggan TV Kabel Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	103
V.19 : Data Sekunder Indikator Pengawasan Tidak Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	104
V.20 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Komisioner, Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel, dan Masyarakat Pelanggan TV Kabel Mengenai Semua Indikator Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	107
V.21 : Data Sekunder Variabel Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru).....	34
IV.1 : Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Periode 2017-2020	66
V.1 : Diagram Alur Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar kuisisioner (untuk responden komisioner) penelitian tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru).....	127
2. Daftar kuisisioner (untuk responden LPB TV Kabel) penelitian tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	138
3. Daftar kuisisioner (untuk responden masyarakat pelanggan TV Kabel) penelitian tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	148
4. Daftar wawancara penelitian tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	158
5. Data Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel) Legal dan Ilegal di Kota Pekanbaru	163
6. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Komisioner KPID Riau tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	166
7. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	167
8. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Pelanggan TV Kabel tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	169
9. Foto dokumentasi penelitian tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)	171

10. SK Dekan Fisipol UIR No.408/UIR-Fs/Kpts/2017 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an.Josua Butarbutar 181
11. Surat Rekomendasi No.503/DPMPTSP/Non Izin-Riset/14788 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi an.Josua Butarbutar 182
12. Surat Keterangan No.204/KPID-Riau/X/2018 dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau tentang Keterangan Penelitian an.Josua Butarbutar 183

